

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah literature review adalah suatu uraian yang berkaitan dengan teori, konsep serta temuan maupun hasil dari penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan atau landasan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu bermanfaat untuk memberikan pandangan terhadap suatu permasalahan yang sama di daerah lain dan dapat memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut penjabaran penelitian terdahulu yang berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini, beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya :

Tabel 2.1.1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN	TEMUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	PERSAMAAN PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
1	“Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (Studi pada Kelompok BKR Mentikan II Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit	Implementasi BKR secara umum belum berhasil secara optimal. Permasalahan ditemukan pada keterbatasan kerja sama dengan lembaga	Kualitatif deskriptif, dengan fokus pada ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan	Sama-sama meneliti implementasi Program BKR dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sama-sama melihat pelaksanaan program, sasaran, serta	Penelitian Dohan & Rahayu berlokasi di BKR Mentikan II Kota Mojokerto dan menggunakan perspektif ketepatan kebijakan,

	Kulon Kota Mojokerto)” – Mochamad Dohan & Tjitjik Rahayu (2020)	terkait, keterbatasan alat peraga, kemampuan kader dalam membuat materi penyuluhan, serta kesiapan sasaran yang masih rendah. Pencapaian target sasaran hanya sekitar 57%. (Ejournal Unesa)	n. (Ejournal Unesa)	faktor yang memengaruhi implementasi BKR.	pelaksanaan, target, dan lingkungan. Juga menggunakan model teori implementasi kebijakan Charles O. Jones. Penelitian ini berfokus pada implementasi BKR oleh tim BKKBN di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis
2	“Efektivitas Pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Parepare” – Muh. Lutfi Agung Selmi, Haniarti & Ayu Dwi Putri Rusman (2021)	Pelaksanaan BKR di Kota Parepare belum efektif. Hal tersebut terlihat dari rendahnya partisipasi dan kesadaran anggota, minimnya sarana dan prasarana, kurang optimalnya sosialisasi, serta belum konsistennya koordinasi dalam menentukan jadwal kegiatan. (Garuda)	Kuantitatif deskriptif. Penelitian melibatkan 22 kelompok BKR dengan responden yang mewakili setiap kelompok. (Garuda)	Sama-sama membahas Program BKR dan permasalahan dalam pelaksanaan program, khususnya mengenai partisipasi masyarakat, sarana prasarana, sosialisasi, dan koordinasi.	Penelitian Selmi dkk. menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada efektivitas program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada implementasi program oleh tim BKKBN di Kecamatan Kawali.

3	“Peran Kelompok Bina Keluarga Remaja dalam Membina Remaja di Kampung KB Bahari Kelurahan Lappa” – Darmawati & Muhammad Suyuti (2021/2022)	Kelompok BKR berperan melalui penyuluhan, pembinaan, dan bimbingan. Namun, kegiatan penyuluhan belum dilaksanakan setiap bulan sesuai pedoman dan partisipasi sasaran masih rendah. Pelayanan bimbingan/konseling juga belum optimal karena keterbatasan kemampuan kelompok BKR. (Jurnal UMSI)	Kualitatif, dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Jurnal UMSI)	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, membahas BKR, serta melihat pelaksanaan kegiatan, partisipasi sasaran, kemampuan pelaksana/kader, dan hambatan program.	Penelitian ini menitikberatkan pada peran kelompok BKR dalam membina remaja, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi program BKR oleh tim BKKBN. Lokasi penelitian juga berbeda, yaitu Kelurahan Lappa dan Kecamatan Kawali.
4	“Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai Sarana Edukasi Keluarga (Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas Kabupaten	BKR diposisikan sebagai sarana edukasi keluarga untuk meningkatkan pengetahuan keluarga dalam menghadapi perkembangan remaja. Penelitian	Kualitatif deskriptif.	Sama-sama meneliti implementasi Program BKR, menggunakan pendekatan kualitatif, serta melihat bagaimana program dilaksanakan di tingkat desa/masyarakat.	Penelitian Marwiyah dkk. lebih menekankan BKR sebagai sarana edukasi keluarga, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi program oleh tim BKKBN dengan ruang

	Probolinggo)” – Siti Marwiyah, Ach. Noor Busthomi & Maya Sofiana (2022)	menunjukkan bahwa implementasi program masih menghadapi persoalan pada aspek input, khususnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya edukasi keluarga. (Mandala Nursa E-Journal)			lingkup Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
5	“Implementasi Program Bina Keluarga Remaja dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kampung KB Candisari Kabupaten Purworejo” – Evada Hardiyanti & Ilyas (2023)	Implementasi BKR dilakukan melalui penyuluhan, pembentukan pengurus dan kader, kunjungan rumah, pencatatan dan pelaporan, serta kemitraan. Faktor pendukungnya antara lain kader dan sasaran yang aktif, sarana prasarana, serta dukungan pemerintah. Hambatannya berupa	Kualitatif, dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara.	Sangat relevan karena sama-sama membahas implementasi BKR, proses pelaksanaan, kader, sasaran, sarana prasarana, dukungan pemerintah, serta hambatan program.	Penelitian Hardiyanti & Ilyas dilakukan pada Kampung KB Candisari Kabupaten Purworejo dan mengaitkan implementasi BKR dengan ketahanan keluarga. Penelitian ini lebih spesifik mengkaji implementasi oleh tim BKKBN di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

		keterbatasan pendanaan dan rendahnya pemahaman masyarakat. (Lifelong Education Journal)			
6	“Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini di Kabupaten Sidoarjo” – Lailatul Fitria & Ahmad Riyadh U.B. (2024)	Program BKR belum optimal. Pemahaman masyarakat terhadap program masih rendah dan partisipasi masyarakat minim. Dari target 25–30 peserta, hanya sekitar 5–10 orang yang mengikuti sosialisasi. Penelitian menyarankan peningkatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat. (Ranah Research)	Deskriptif kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan indikator ketepatan sasaran, pemahaman program, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. (Ranah Research)	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas pelaksanaan BKR, terutama pemahaman masyarakat, partisipasi sasaran, sosialisasi, dan pencapaian program.	Penelitian Fitria & Riyadh berorientasi pada efektivitas BKR dalam meminimalisasi pernikahan dini, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi program BKR dan aktor pelaksanaannya, yaitu tim BKKBN.
7	“Youth Readiness for Family Life Through the BKR Program in Gelang Village:	Program BKR menunjukkan keberhasilan sebagian, antara lain peningkatan pemahaman kesehatan	Penelitian mengevaluasi implementasi BKR secara kualitatif menggunakan	Sama-sama membahas implementasi BKR di tingkat desa, partisipasi sasaran, sumber daya manusia,	Penelitian ini lebih menekankan kesiapan pemuda untuk kehidupan berkeluarga dan

	Persiapan Pemuda untuk Kehidupan Keluarga Melalui Program BKR di Desa Gelang” – Roudhotul Syarifah Ulyah & Isnaini Rodiyah (2025)	reproduksi dan penurunan pernikahan dini. Namun, partisipasi dan konsistensi kegiatan masih rendah karena keterbatasan sumber daya manusia dan kegiatan yang tidak teratur. Penelitian menekankan pentingnya kolaborasi, partisipasi pemuda, dan monitoring berkelanjutan . (Indonesian Journal of Culture)	indikator efektivitas Edy Sutrisno.	konsistensi kegiatan, serta kebutuhan kolaborasi antaraktor.	efektivitas program, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi BKR oleh tim BKKBN di Kecamatan Kawali. Selain itu, lokasi dan karakteristik wilayah penelitian berbeda.
8	“Komunikasi Interpersonal antara Orang Tua dan Anak Remaja serta Identitas Diri Remaja: Studi di Bina Keluarga Remaja Parupuk Tabing, Koto Tangah,	Penelitian menunjukkan komunikasi interpersonal antara orang tua dan remaja masih berada pada tingkat sedang dan cenderung rendah. Hasil tersebut menunjukkan perlunya penguatan pembinaan BKR melalui materi yang	Menggunakan pendekatan pengembangan ADDIE, penyusunan instrumen melibatkan ahli dan pembina/konselor BKR. Data dianalisis secara deskriptif	Sama-sama mengkaji BKR dan pembinaan keluarga yang memiliki remaja serta melihat peran pembina/pelaksana dalam mendukung keberhasilan program.	Fokus penelitian Irianto dkk. adalah komunikasi interpersonal dan identitas diri remaja, bukan implementasi kebijakan/program. Penelitian ini berfokus pada implementasi BKR oleh tim BKKBN

	Padang, Sumatera Barat” – Agus Irianto, Hasdi Aimon, Herman Nirwana & Agung Tri Prasetya (2018)	dapat meningkatkan komunikasi efektif antara orang tua dan remaja. (Journal UGM)	menggunakan instrumen skala Likert. (Journal UGM)		di Kecamatan Kawali.
8	“Komunikasi Interpersonal antara Orang Tua dan Anak Remaja serta Identitas Diri Remaja: Studi di Bina Keluarga Remaja Parupuk Tabing, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat” – Agus Irianto, Hasdi Aimon, Herman Nirwana & Agung Tri Prasetya (2018)	Penelitian menunjukkan komunikasi interpersonal antara orang tua dan remaja masih berada pada tingkat sedang dan cenderung rendah. Hasil tersebut menunjukkan perlunya penguatan pembinaan BKR melalui materi yang dapat meningkatkan komunikasi efektif antara orang tua dan remaja. (Journal UGM)	Menggunakan pendekatan pengembangan ADDIE, penyusunan instrumen melibatkan ahli dan pembina/konselor BKR. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan instrumen skala Likert. (Journal UGM)	Sama-sama mengkaji BKR dan pembinaan keluarga yang memiliki remaja serta melihat peran pembina/pelaksana dalam mendukung keberhasilan program.	Fokus penelitian Irianto dkk. adalah komunikasi interpersonal dan identitas diri remaja, bukan implementasi kebijakan/program. Penelitian ini berfokus pada implementasi BKR oleh tim BKKBN di Kecamatan Kawali.
10	“Manajemen Penyelenggaraan	Penelitian mengkaji bagaimana	Kualitatif, dengan wawancara	Sangat relevan karena sama-	Penelitian Apriani & Suminar

	araan Program Bina Keluarga Remaja melalui Kegiatan Keterampilan Merajut di RW 06 Kelurahan Bandarjo Ungaran Barat” – Fitri Apriani & Tri Suminar (2016)	program BKR diselenggarakan melalui kegiatan keterampilan serta hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Keterlibatan Ketua BKR, tutor, UPTD KB, PLKB dan peserta menunjukkan pentingnya pengorganisasian aktor dalam pelaksanaan kegiatan. (Journal UNNES)	a, observasi, dan dokumentasi. Informan meliputi pengurus BKR, tutor, UPTD KB, PLKB dan warga belajar. (Journal UNNES)	sama melihat penyelenggaraan BKR, aktor pelaksana, PLKB, organisasi pelaksana dan hambatan program.	lebih berfokus pada manajemen penyelenggaraan BKR melalui kegiatan keterampilan, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi BKR secara lebih luas oleh tim BKKBN di Kecamatan Kawali.
11	“Pemberdayaan Kader sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Kelompok Bina Keluarga Remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan” – Epti Yorita, Diah Eka Nugraheni,	Pemberdayaan melalui sosialisasi, pembentukan kelompok BKR dan pelatihan kader meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kader. Penelitian juga menunjukkan pentingnya keterlibatan PLKB,	Pengabdian berbasis intervensi, menggunakan kuesioner dan observasi untuk mengevaluasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan kader.	Sama-sama melihat kader, PLKB, pemerintah desa/kecamatan, pembentukan kelompok, pelatihan dan pelaksanaan BKR.	Fokus penelitian adalah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kader, bukan analisis implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi sebagai pisau analisis.

	Sri Yanniarti, Wewet Savitri & Ratna Dewi (2023)	puskesmas, kepala desa dan camat sebagai mitra. (UMMAT Scientific Journals)			
12	“Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Gampong Pasi Pinang Kabupaten Aceh Barat” – Siti Rahmah Muzdalifah & Nodi Marefanda (2022)	Pelaksanaan BKR melalui pembinaan orang tua dan remaja dinilai telah berjalan efektif. Program berperan dalam meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pengasuhan dan pembinaan remaja. (Journal Universitas Pahlawan)	Kualitatif studi kasus, dengan observasi dan wawancara. (Journal Universitas Pahlawan)	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas pelaksanaan Program BKR pada tingkat masyarakat.	Penelitian berfokus pada efektivitas BKR, sedangkan penelitian Anda berfokus pada implementasi program. Lokasi penelitian juga berbeda.
13	“Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai Sarana Edukasi Keluarga (Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo	BKR berfungsi sebagai sarana edukasi keluarga untuk meningkatkan pengetahuan mengenai perkembangan remaja, hubungan orang tua-anak, serta pola	Deskriptif kualitatif.	Persamaannya sangat kuat karena sama-sama menggunakan kata kunci implementasi Program BKR dan menempatkan keluarga sebagai sasaran utama program.	Penelitian berfokus pada BKR sebagai sarana edukasi keluarga, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi BKR oleh tim BKKBN di Kecamatan Kawali dengan perspektif

	)” – Siti Marwiyah, Ach. Noor Busthomi & Maya Sofiana (2022)	pengasuhan. Penelitian menekankan pentingnya pelaksanaan edukasi keluarga melalui program BKR. (Mandala Nursa E-Journal)			implementasi kebijakan.
14	“Pemberdayaan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Edukasi Parenting Style pada Orang Tua Remaja” – Devy Putri Nursanti, Eri Puji Kumalasari & Asruria Sani Fajriah (2023)	Pembentukan dan pembinaan kader BKR melalui penyuluhan serta diskusi mengenai kesehatan reproduksi, komunikasi orang tua-remaja dan tata kelola BKR meningkatkan pengetahuan kader. Kegiatan juga menghasilkan pembentukan kader BKR di Kelurahan Bandar Lor. (Garuda)	Pengabdian kepada masyarakat, melalui pembentukan kader, penyuluhan dan diskusi.	Sama-sama memperhatikan kader sebagai pelaksana utama BKR, kapasitas kader, komunikasi, penyuluhan dan tata kelola kegiatan.	Penelitian bersifat pemberdayaan/intervensi, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian implementasi program secara empiris.
15	“Dampak Program Pembinaan Keluarga Remaja (BKR) terhadap	Program BKR dipandang sebagai intervensi BKKBN untuk	Penelitian kuantitatif untuk melihat dampak program terhadap	Sama-sama menempatkan BKR sebagai program BKKBN dan mengkaji	Fokus penelitian pada dampak BKR terhadap pencegahan stunting,

	Upaya Pencegahan Stunting di Balai Penyuluhan KB Palangga” – Ria Harjunia, Sri Susanty & Jafriati (2025)	meningkatkan kualitas keluarga dan remaja. Penelitian menganalisis kontribusi BKR terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam upaya pencegahan stunting. (Jurnal Universitas Imelda Medan)	aspek pengetahuan, sikap dan perilaku.	pelaksanaan program di tingkat masyarakat melalui Balai Penyuluhan KB.	sedangkan penelitian ini pada proses implementasi BKR.
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji, Program Bina Keluarga Remaja (BKR) telah menjadi objek penelitian dalam berbagai perspektif. Penelitian Dohan dan Rahayu (2020), misalnya, mengkaji implementasi Program BKR pada Kelompok BKR Mentikan II Kota Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program belum berjalan secara optimal yang ditandai dengan keterbatasan kerja sama dengan lembaga terkait, keterbatasan alat peraga, kemampuan kader dalam menyusun materi penyuluhan, serta rendahnya kesiapan sasaran. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan.

Kajian mengenai pelaksanaan BKR juga dilakukan oleh Selmi, Haniarti dan Rusman (2021), yang menemukan bahwa pelaksanaan BKR di Kota Parepare belum efektif. Permasalahan yang ditemukan meliputi rendahnya partisipasi dan

kesadaran anggota, keterbatasan sarana dan prasarana, sosialisasi yang belum optimal, serta koordinasi dalam penentuan jadwal kegiatan yang belum konsisten. Berbeda dengan penelitian Dohan dan Rahayu, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan lebih menekankan pada efektivitas program.

Selanjutnya, Darmawati dan Suyuti (2021/2022) menempatkan kelompok BKR sebagai aktor yang berperan dalam pembinaan remaja melalui penyuluhan, pembinaan dan bimbingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan belum dilaksanakan secara rutin sesuai pedoman, partisipasi sasaran masih rendah, dan kemampuan kelompok BKR dalam memberikan bimbingan atau konseling masih terbatas. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas pelaksana dan keterlibatan sasaran menjadi unsur penting dalam keberhasilan pelaksanaan BKR.

Penelitian Marwiyah, Busthomi dan Sofiana (2022) kemudian melihat BKR sebagai sarana edukasi keluarga. Hasilnya menunjukkan bahwa BKR memiliki fungsi penting dalam meningkatkan pengetahuan keluarga mengenai perkembangan remaja, tetapi implementasi program masih menghadapi persoalan pada aspek input, terutama berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya edukasi keluarga. Sementara itu, Hardiyanti dan Ilyas (2023) menunjukkan bahwa implementasi BKR dilakukan melalui penyuluhan, pembentukan pengurus dan kader, kunjungan rumah, pencatatan dan pelaporan serta kemitraan. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi faktor pendukung berupa keaktifan kader dan sasaran, sarana prasarana dan dukungan pemerintah, sedangkan

keterbatasan pendanaan dan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi factor penghambat.

Penelitian lainnya lebih banyak mengarahkan perhatian pada hasil atau tujuan khusus BKR. Fitria dan Riyadh (2024), misalnya, mengkaji efektivitas BKR dalam meminimalisasi pernikahan dini dan menemukan bahwa pemahaman serta partisipasi masyarakat masih rendah. Ulyah dan Rodiyah (2025) mengkaji kesiapan pemuda untuk kehidupan berkeluarga melalui BKR dan menemukan bahwa meskipun terjadi peningkatan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan penurunan pernikahan dini, partisipasi dan konsistensi kegiatan masih rendah akibat keterbatasan sumber daya manusia dan kegiatan yang tidak teratur. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan partisipasi, sumber daya manusia, konsistensi kegiatan dan monitoring masih menjadi persoalan yang berulang dalam pelaksanaan BKR.

Di sisi lain, penelitian Irianto dkk. (2018) memperlihatkan bahwa persoalan BKR juga berkaitan dengan komunikasi interpersonal antara orang tua dan remaja. Penelitian tersebut menemukan bahwa komunikasi interpersonal masih berada pada tingkat sedang dan cenderung rendah sehingga diperlukan penguatan pembinaan BKR melalui materi yang mampu meningkatkan komunikasi efektif antara orang tua dan remaja.

Penelitian Apriani dan Suminar (2016) menambahkan perspektif mengenai manajemen penyelenggaraan BKR dan menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai aktor, seperti pengurus BKR, tutor, UPTD KB, PLKB dan peserta dalam penyelenggaraan kegiatan.

Penelitian mengenai pemberdayaan kader juga menunjukkan bahwa kapasitas pelaksana menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan BKR. Yorita dkk. (2023) menemukan bahwa sosialisasi, pembentukan kelompok BKR dan pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan kader.

Penelitian Nursanti dkk. (2023) juga menunjukkan bahwa penyuluhan dan diskusi mengenai kesehatan reproduksi, komunikasi orang tua-remaja dan tata kelola BKR dapat meningkatkan pengetahuan kader. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian sebelumnya bahwa kualitas pelaksana atau kader mempunyai hubungan penting dengan keberlangsungan kegiatan BKR di tingkat masyarakat.

Apabila keseluruhan penelitian terdahulu tersebut dibandingkan, dapat dilihat bahwa penelitian BKR selama ini cenderung berkembang dalam beberapa fokus utama. Pertama, penelitian mengenai implementasi dan efektivitas program, seperti penelitian Dohan dan Rahayu (2020), Selmi dkk. (2021), Marwiyah dkk. (2022), Hardiyanti dan Ilyas (2023), serta Fitria dan Riyadh (2024). Kedua, penelitian mengenai peran dan kapasitas kader atau kelompok BKR, seperti penelitian Darmawati dan Suyuti (2021/2022), Apriani dan Suminar (2016), Yorita dkk. (2023), dan Nursanti dkk. (2023). Ketiga, penelitian yang mengkaji hasil atau tujuan spesifik program, seperti komunikasi orang tua-remaja, kesiapan pemuda, pendewasaan usia perkawinan, dan pencegahan masalah kesehatan tertentu. Dengan demikian, penelitian terdahulu telah memberikan gambaran bahwa keberhasilan BKR tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kapasitas pelaksana, partisipasi sasaran, komunikasi, koordinasi, sarana prasarana, dukungan pemerintah dan kondisi lingkungan pelaksanaan.

Meskipun demikian, berdasarkan susunan penelitian terdahulu tersebut masih terdapat ruang kajian yang dapat dikembangkan. Sebagian penelitian yang membahas implementasi BKR lebih menitikberatkan pada keberhasilan atau ketidakefektifan program, sedangkan aspek proses implementasi yang dilihat secara sistematis berdasarkan hubungan antara standar kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana dan lingkungan implementasi belum menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian tersebut.

Selain itu, beberapa penelitian lebih memusatkan perhatian pada kelompok BKR atau kader sebagai pelaksana di tingkat masyarakat, bukan pada bagaimana program tersebut diimplementasikan oleh aktor kelembagaan BKKBN bersama pelaksana di tingkat kecamatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menempatkan diri pada kajian implementasi Program BKR oleh tim BKKBN di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Posisi penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena tidak semata-mata menilai apakah program efektif atau tidak, maupun hanya mendeskripsikan peran kader, tetapi berupaya memahami bagaimana proses implementasi Program BKR berlangsung, faktor-faktor apa yang memengaruhinya, serta bagaimana hubungan antara pelaksana program dengan sasaran dan lingkungan pelaksanaan program.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, kebaruan lokus, yaitu penelitian dilakukan di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, sehingga memberikan gambaran empiris mengenai implementasi BKR pada konteks wilayah

yang belum menjadi fokus penelitian-penelitian yang tercantum dalam penelitian terdahulu. Kedua, kebaruan fokus, yaitu penelitian menempatkan tim BKKBN sebagai bagian penting dari proses implementasi dan tidak hanya melihat BKR dari sisi kelompok atau kader penerima program.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai proses implementasi Program BKR pada tingkat kecamatan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi persoalan partisipasi masyarakat, keterbatasan kader, sarana prasarana atau sosialisasi sebagaimana ditemukan dalam penelitian sebelumnya, tetapi menganalisis bagaimana berbagai persoalan tersebut muncul dan saling berkaitan dalam proses implementasi program.

Posisi tersebut menjadi dasar bahwa penelitian mengenai “Implementasi Program BKR oleh Tim BKKBN di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis” memiliki relevansi dan kebaruan dalam kajian Administrasi Publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan/program kependudukan dan pembangunan keluarga.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perkembangan Administrasi Publik Kontemporer

Perkembangan administrasi publik kontemporer pada dasarnya bergerak dari model birokrasi klasik dan New Public Management yang menekankan efisiensi, kinerja, dan logika manajerial, menuju New Public Governance yang menempatkan kolaborasi antarlembaga, partisipasi warga, dan tata kelola jejaring

sebagai orientasi utama pelayanan publik (Barbier & K Tenge, 2023; Krogh & Triantafillou, 2024; Nurman et al., 2024). Dalam perkembangan mutakhir, paradigma-paradigma tersebut tidak sepenuhnya saling menggantikan, melainkan hidup berdampingan dan membentuk praktik administrasi yang hibrid; karena itu reformasi tata kelola yang efektif tidak cukup hanya mengadopsi paradigma baru, tetapi harus menyelaraskan kapasitas institusional, proses partisipatif, dan konteks sosial lokal (Nurman et al., 2024; Rahman et al., 2026).

Secara filosofis, administrasi publik kontemporer memandang negara sebagai plural state, yaitu arena tempat banyak aktor saling bergantung dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan layanan, sehingga efektivitas program publik semakin ditentukan oleh kualitas hubungan antarlembaga dan tata kelola proses, bukan semata oleh kontrol hierarkis internal (Krogh & Triantafillou, 2024; Songklin, 2024). Namun, literatur terbaru juga menegaskan bahwa fokus pada jejaring eksternal saja tidak memadai, karena transformasi kolaboratif di dalam tubuh birokrasi sendiri merupakan dimensi penting yang menentukan keberhasilan reformasi administrasi dan implementasi program (Krogh & Triantafillou, 2024).

Dalam konteks kebijakan publik kontemporer, dinamika implementasi dipahami sebagai evolusi perubahan institusi, aktor, isi kebijakan, dan arah pemerintahan dari waktu ke waktu, sehingga implementasi program tidak dapat dibaca secara statis, melainkan sebagai proses adaptif yang dipengaruhi perubahan rezim, struktur organisasi, dan relasi antaraktor (Putera et al., 2023).

Perspektif ini relevan bagi penelitian implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) karena masalah publik yang semakin kompleks juga

menuntut administrasi yang adaptif, inovatif, dan berbasis bukti, bukan sekadar administratif-prosedural (Nurman et al., 2024). Dalam konteks Indonesia yang terdesentralisasi, keberhasilan implementasi program publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah, khususnya kapasitas analitis, operasional, dan politik, yang bersifat saling melengkapi dalam perencanaan dan pelaksanaan program (Setiawan et al., 2022). Bukti ini penting karena desentralisasi di Indonesia telah memindahkan tanggung jawab banyak layanan publik ke tingkat daerah, tetapi pada saat yang sama masih dihadapkan pada persoalan keterbatasan perencanaan, kerumitan administrasi anggaran, dan ketimpangan kapasitas lokal (Setiawan et al., 2022).

Literatur program keluarga berencana menunjukkan bahwa setelah desentralisasi, pelaksanaan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus semakin responsif terhadap kebutuhan lokal, menjunjung hak reproduksi, dan dibangun melalui kolaborasi erat antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pemerintah daerah, tenaga layanan, dan masyarakat (Amini et al., 2024). Pada tingkat implementasi, keberhasilan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi yang mendukung, tindak lanjut atas umpan balik masyarakat, partisipasi warga, kolaborasi dengan fasilitas kesehatan, serta monitoring dan evaluasi (Suardi Mukhlis et al., 2025).

Untuk penelitian mengenai implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, administrasi publik kontemporer paling tepat dijadikan landasan filosofis melalui lensa New Public Governance dan tata kelola kolaboratif, karena program pembangunan keluarga pada level lokal menuntut koordinasi lintasaktor, sensitivitas pada kebutuhan masyarakat, dan penguatan kapasitas organisasi pelaksana (Krogh & Triantafillou, 2024; lAshilly Achidsti et al, 2024). Relevansi ini semakin kuat pada level kecamatan karena studi mutakhir menunjukkan bahwa penerapan prinsip NPG di tingkat subdistrik menekankan kolaborasi, partisipasi warga, inovasi layanan, fleksibilitas, serta integrasi nilai lokal untuk meningkatkan kepercayaan, akuntabilitas, dan keberterimaan program (lAshilly Achidsti et al, 2024).

Sebagai penguat konteks substantif, studi tentang program Bina Keluarga Balita menunjukkan bahwa peran penyuluh lapangan sangat vital, kinerjanya menentukan keberhasilan intervensi kelompok sasaran, dan distribusi personel yang tidak merata dapat menjadi kendala implementasi di daerah (Hutagalung et al., 2021).

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini mendukung argumentasi bahwa penelitian implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) perlu diletakkan pada kerangka administrasi publik kontemporer yang melihat implementasi sebagai proses kolaboratif, kontekstual, adaptif, dan sangat bergantung pada kapasitas birokrasi lokal serta keterlibatan masyarakat.

2.2.2 Kebijakan Publik

Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa kebijakan publik layak dijadikan landasan filosofis penelitian implementasi program Bina Keluarga

Remaja (BKR) oleh tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Kawali karena literatur mutakhir memandang kebijakan bukan sekadar keputusan formal negara, tetapi proses adaptif yang menghubungkan tujuan publik, kapasitas institusi, partisipasi warga, dan konteks lokal (Rassanjani & Meesonk, 2025; Souza & Rossoni, 2025; Yunika Depri Listiana et al., 2025). Dalam kerangka itu, implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) lebih tepat dibaca sebagai proses governance yang menuntut keselarasan antara desain kebijakan, pelaksana, jejaring kelembagaan, dan kebutuhan keluarga sasaran di tingkat kecamatan (Rassanjani & Meesonk, 2025; Souza & Rossoni, 2025; Yunika Depri Listiana et al., 2025).

Kebijakan publik dalam literatur kontemporer dipahami sebagai serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatasi persoalan sosial dan menerjemahkan visi negara ke dalam program, prosedur, dan struktur pelaksanaan yang konkret (Souza & Rossoni, 2025; Yunika Depri Listiana et al., 2025). Model klasik yang memandang proses kebijakan secara linear melalui tahap agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi masih dipakai sebagai fondasi analitis, tetapi penerapannya sering dibatasi oleh faktor politik, kelembagaan, dan sosial budaya sehingga pendekatan implementasi yang kaku semakin dianggap tidak memadai (Rassanjani & Meesonk, 2025; Souza & Rossoni, 2025).

Literatur lima tahun terakhir bergerak ke arah pandangan yang lebih refleksif, yakni bahwa perubahan paradigma administrasi membentuk logika kebijakan yang berbeda, dari kontrol hierarkis menuju tata kelola yang lebih kolaboratif dan partisipatif, karena paradigma-paradigma itu hidup berdampingan,

reformasi implementasi tidak cukup dilakukan dengan mengganti model formal, tetapi harus menyelaraskan kapasitas institusional dengan proses partisipatif dan kondisi lokal (Rahman et al., 2026).

Sebagai landasan filosofis, literatur terbaru menegaskan pentingnya membawa pemikiran filsafat secara lebih sistematis ke dalam studi administrasi publik agar asumsi dasar teori dan praktik kebijakan dapat dibaca secara lebih utuh dan kritis, perspektif ini relevan karena pendekatan filosofis tidak hanya mengisi celah teori, tetapi juga menantang asumsi tersembunyi dalam kebijakan dan implementasi, termasuk bagaimana negara membangun public value, legitimasi, dan relasi dengan warga (Ongaro & Yang, 2025).

Dalam ranah implementasi, bukti terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan top-down sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara legitimasi hukum kebijakan dan skema makna yang dimiliki pelaksana kebijakan. Jika isi kebijakan selaras dengan nilai dan keyakinan aparatur, rasa memiliki meningkat dan peluang kepatuhan juga meningkat, sedangkan ketidakselarasan cenderung mendorong penyesuaian implementasi, resistensi, atau bahkan kepatuhan seremonial (Souza & Rossoni, 2025).

Kebijakan publik juga semakin dipahami sebagai proses yang tidak dapat dilepaskan dari pendekatan bottom-up dan keterlibatan para aktor lapangan, karena implementasi pada akhirnya adalah proses mengubah rancangan kebijakan menjadi praktik nyata. Karena itu, keberhasilan implementasi cenderung ditentukan oleh mutu desain kebijakan, keterlibatan pemangku kepentingan, institusi dan konteks, serta strategi implementasi yang dipakai (Selepe, 2023).

Dalam konteks program keluarga dan kependudukan di Indonesia, literatur menunjukkan bahwa program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya berorientasi pada pengendalian kelahiran, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta kesejahteraan keluarga (Asmidar et al., 2022; Suardi Mukhlis et al., 2025).

Namun, implementasi program keluarga berencana dan pembangunan keluarga belum selalu optimal setelah reformasi, sehingga koordinasi lintas sektor, sosialisasi, dan pendampingan tetap menjadi kebutuhan utama (Asmidar et al., 2022). Literatur implementasi kebijakan juga konsisten menyebut bahwa keterbatasan sumber daya, resistensi sosial, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia merupakan hambatan utama yang hanya dapat diatasi melalui komunikasi efektif, kebijakan berbasis data, penguatan kapasitas, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan (Suardi Mukhlis et al., 2025; Yunika Depri Listiana et al., 2025).

Landasan yang paling sesuai untuk penelitian implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali adalah kebijakan publik yang dipahami sebagai governance kolaboratif dan adaptif, karena implementasi program sosial di tingkat lokal menuntut pemahaman bersama atas masalah, keterhubungan antara kebijakan dan layanan, serta pandangan kelembagaan yang melampaui batas satu organisasi (Bianchi et al., 2021). Pandangan ini sejalan dengan tuntutan pendekatan yang partisipatif, transparan, peka konteks, dan berorientasi pada institusi yang inklusif sebagaimana ditekankan dalam literatur

governance mutakhir dan kerangka normatif SDG 16 (Rassanjani & Meesonk, 2025).

Dengan demikian, secara akademik dapat dirumuskan bahwa kebijakan publik sebagai landasan filosofis penelitian implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh tim BKKBN di Kecamatan Kawali bertumpu pada empat asumsi utama: kebijakan adalah instrumen negara untuk memecahkan masalah publik, implementasi adalah proses sosial-institusional yang kompleks, keberhasilan program bergantung pada kolaborasi dan kapasitas lokal, dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan serta ketahanan keluarga. Atas dasar itu, penelitian tentang implementasi program Bina Keluarga Remaja Nasional (BKR) di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, paling tepat ditempatkan dalam perspektif kebijakan publik yang kolaboratif, partisipatif, berbasis nilai, dan sensitif terhadap konteks lokal.

2.2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik paling tepat dijadikan landasan filosofis penelitian program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh tim Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Kawali karena literatur mutakhir memandang implementasi sebagai proses adaptif, partisipatif, dan kontekstual, bukan sekadar pelaksanaan teknis dari keputusan formal.

Landasan ini relevan untuk Bina Keluarga Remaja (BKR) karena program keluarga-remaja berjalan melalui interaksi antara desain kebijakan, kapasitas

pelaksana, jejaring lintas sektor, dan partisipasi keluarga sasaran (Putra et al., 2024; Rassanjani & Meesonk, 2025; Souza & Rossoni, 2025).

Model kebijakan yang linear tetap berguna sebagai kerangka dasar, tetapi praktik implementasi sering dibatasi oleh faktor politik, kelembagaan, dan sosial-budaya sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel (Rassanjani & Meesonk, 2025; Souza & Rossoni, 2025). Karena itu, tata kelola yang efektif cenderung menuntut partisipasi, transparansi, dan ketahanan institusional sebagai nilai normatif utama (Rassanjani & Meesonk, 2025).

Secara filosofis, studi administrasi publik terbaru menegaskan bahwa pemikiran filsafat perlu dipakai lebih sistematis untuk membaca asumsi dasar teori dan praktik implementasi kebijakan, lensa seperti Critical Realism berguna karena membantu menjelaskan hubungan antara struktur, aktor, dan konteks yang membentuk hasil implementasi, termasuk penciptaan nilai publik (Ongaro & Yang, 2025).

Literatur Bina Keluarga Remaja (BKR) menunjukkan bahwa program ini ditujukan untuk membina ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitas remaja, dengan sasaran keluarga yang memiliki anak usia 10–24 tahun (Harjunia et al., 2025; Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025). Bukti empiris terbaru juga menunjukkan bahwa Bina Keluarga Remaja (BKR) berasosiasi dengan peningkatan pengetahuan, sikap, dan tindakan remaja dalam pencegahan stunting (Harjunia et al., 2025).

Hambatan yang paling konsisten adalah kekurangan SDM, rendahnya komitmen antar sektor, dan lemahnya partisipasi kader (Ni Putu Glory Damayanti

et al., 2025; Yunika Depri Listiana et al., 2025). Literatur yang lebih luas tentang kebijakan kependudukan Indonesia juga menegaskan bahwa komunikasi efektif, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi tetap menjadi faktor inti keberhasilan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (Suardi Mukhlis et al., 2025). Kolaborasi antara remaja, orang tua, sekolah, pendidik, konselor, dan dukungan kebijakan pemerintah muncul sebagai syarat penting agar Bina Keluarga Remaja (BKR) menghasilkan dampak substantif (Harjunia et al., 2025).

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini mendukung penggunaan implementasi kebijakan publik sebagai landasan filosofis penelitian tentang implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Fokus filosofis yang paling relevan adalah implementasi sebagai proses kolaboratif, bernilai publik, dipengaruhi politik dan kapasitas birokrasi, serta harus disesuaikan dengan konteks lokal keluarga dan remaja sasaran.

2.2.4 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Model implementasi Van Meter dan Van Horn relevan untuk penelitian implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, karena literatur lima tahun terakhir konsisten menempatkan keberhasilan implementasi pada enam variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarlembaga, karakteristik organisasi

pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Efiyanti et al., 2022; Kiemas et al., 2026; Kosim et al., 2024; Nuralisa et al., 2025; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023). Model ini juga memandang implementasi sebagai proses yang bergerak relatif linear dari keputusan kebijakan ke pelaksana lalu ke kinerja kebijakan, tetapi hasil akhirnya ditentukan oleh hubungan antarseluruh variabel tersebut, bukan oleh desain kebijakan saja (Muksin et al., 2024; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Dalam model ini, standar dan tujuan kebijakan menjadi titik awal pengukuran kinerja implementasi, sehingga sasaran program harus realistis dan sesuai dengan konteks sosial-budaya pelaksana (Efiyanti et al., 2022; Muksin et al., 2024). Untuk konteks Bina Keluarga Remaja (BKR), implikasinya adalah tujuan pembinaan keluarga remaja, target partisipasi, dan indikator capaian lapangan harus diterjemahkan secara operasional, bukan berhenti pada rumusan normatif (Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Variabel sumber daya dalam literatur terbaru mencakup sumber daya manusia, keuangan, waktu, infrastruktur, dan bahkan validitas data, sehingga keterbatasan pada salah satu unsur itu sering langsung menurunkan mutu implementasi (Fauziyah & Arif, 2021; Kiemas et al., 2026; Muksin et al., 2024; Nuralisa et al., 2025).

Variabel komunikasi antar lembaga juga menjadi penentu karena standar program harus dipahami pelaksana secara akurat dan konsisten, sementara banyak studi menunjukkan bahwa koordinasi formal saja belum cukup bila tidak diikuti

sinkronisasi lapangan (Purnawati et al., 2026; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Pada program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), penggunaan model ini relevan karena implementasi Bina Keluarga Remaja (BKR) bergantung pada kapasitas organisasi pelaksana, peran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan kader, serta dukungan jejaring lokal. Studi implementasi Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kuta Selatan menunjukkan program belum berjalan baik karena kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), rendahnya komitmen antarsektor, dan partisipasi kader yang lemah (Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025). Sebaliknya, studi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kalimantan Tengah menunjukkan dukungan kebijakan daerah, kolaborasi lintas sektor, keaktifan Penyuluh Lapangan Keluarga Remaja (PLKB), dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung utama implementasi program keluarga dan remaja (Latifah, 2025).

Model Van Meter dan Van Horn juga sesuai untuk membaca Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai program yang menuntut keterpaduan antara tujuan program, materi pembinaan, dan praktik lapangan. Bina Keluarga Remaja (BKR) sendiri ditujukan bagi keluarga dengan remaja usia 10–24 tahun untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua dalam membina tumbuh kembang remaja (Dewi et al., 2022; Harjunia et al., 2025; Novianti & Fatonah, 2021). Karena itu, keberhasilan implementasinya tidak cukup diukur dari keberadaan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), tetapi dari apakah pelaksana mampu membangun pembinaan rutin, kader yang terlatih, materi yang sesuai, dan mekanisme

monitoring yang berkelanjutan (Dewi et al., 2022; Khairina & Saleh, 2021; Kosim et al., 2024).

Implementasi Bina Keluarga Remaja (BKR) yang efektif dalam beberapa studi memang dikaitkan dengan peningkatan pengetahuan dan sikap sasaran, tetapi hasil seperti itu muncul ketika dukungan pelaksana dan pembinaan berjalan nyata. Program Bina Keluarga Remaja (BKR) di Palangga Selatan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan, sikap, dan tindakan remaja dalam pencegahan stunting (Harjunia et al., 2025), sedangkan pembinaan kelompok Bina keluarga Remaja (BKR) di Sukaraja meningkatkan skor rata-rata pengetahuan dan sikap remaja tentang pendewasaan usia perkawinan (Dewi et al., 2022).

Temuan ini sejalan dengan asumsi Van Meter dan Van Horn bahwa keberhasilan implementasi merupakan hasil interaksi antara tujuan yang jelas, sumber daya memadai, komunikasi yang efektif, karakter organisasi yang siap, disposisi pelaksana yang mendukung, dan lingkungan eksternal yang kondusif (Nuralisa et al., 2025; Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023).

Dengan demikian, Model Implementasi Van Meter dan Van Horn dapat dijadikan dasar teoretis yang kuat untuk penelitian implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, karena model ini memungkinkan analisis yang sistematis terhadap hubungan antara tujuan program, kapasitas pelaksana, koordinasi antarlembaga, karakter organisasi, sikap pelaksana, dan kondisi lingkungan lokal. Untuk judul penelitian tersebut, model ini paling

berguna untuk menjelaskan mengapa program Bina Keluarga Remaja (BKR) dapat berjalan efektif di satu konteks, tetapi belum optimal di konteks lain.

2.2.5 Program Bina Keluarga Remaja (BKR)

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) layak dijadikan fokus tinjauan pustaka untuk penelitian implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, karena literatur lima tahun terakhir menempatkan Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai instrumen pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas remaja melalui penguatan peran orang tua, kader, dan jejaring layanan lokal (Dewi et al., 2022; Harjunia et al., 2025; Suardi Mukhlis et al., 2025).

Bina Keluarga Remaja (BKR) juga dipahami sebagai program berbasis kelompok bagi keluarga yang memiliki remaja usia 10–24 tahun, dengan orientasi pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku pengasuhan agar keluarga lebih mampu mendampingi tumbuh kembang remaja (Astuty et al., 2022; Dewi et al., 2022; Harjunia et al., 2025).

Bina Keluarga Remaja (BKR) dirancang sebagai wadah edukasi dan pertukaran informasi bagi orang tua dan keluarga untuk memahami dunia remaja, masalah yang mereka hadapi, dan cara berinteraksi yang tepat (Astuty et al., 2022; Dewi et al., 2022; Kosim et al., 2024). Materi yang dibahas dalam Bina Keluarga Remaja (BKR) mencakup pendewasaan usia perkawinan, komunikasi efektif orang tua dan remaja, kesehatan reproduksi, seksualitas, narkoba, HIV/AIDS, life skills,

gizi remaja, dan peran orang tua dalam pembinaan tumbuh kembang remaja (Astuty et al., 2022; Dewi et al., 2022; Kosim et al., 2024).

Literatur juga menunjukkan bahwa Bina Keluarga Remaja (BKR) bukan program yang berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan ekosistem program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lain seperti GenRe, PUP, dan PIK-R untuk membentuk kesadaran remaja dan keluarga tentang perencanaan kehidupan berkeluarga yang bertanggung jawab (Latifah, 2025). Dalam praktik lapangan, Bina Keluarga Remaja (BKR) dijalankan melalui sosialisasi, penyuluhan, pendampingan keluarga, intervensi langsung, dan kolaborasi dengan organisasi perempuan maupun aktor komunitas (Dewi et al., 2022; Latifah, 2025; Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025).

Bukti empiris terbaru menunjukkan bahwa Bina Keluarga Remaja (BKR) dapat menghasilkan dampak positif pada sasaran program. Studi kuantitatif di Palangga Selatan menemukan bahwa Bina Keluarga Remaja (BKR) berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan, sikap, dan tindakan remaja dalam pencegahan stunting, dengan nilai $p < 0,001$ pada ketiga variabel (Harjunia et al., 2025). Kegiatan pembinaan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Sukaraja juga meningkatkan skor rata-rata pengetahuan dan sikap remaja terkait pendewasaan usia perkawinan, dan pelaksanaannya didukung penuh oleh kehadiran peserta serta tindak lanjut monitoring-evaluasi (Dewi et al., 2022).

Namun, efektivitas implementasi Bina Keluarga Remaja (BKR) tidak selalu merata. Studi di Kuta Selatan melaporkan bahwa implementasi Bina Keluarga Remaja (BKR) belum mencapai hasil baik pada indikator organisasi,

interpretasi, dan penerapan (Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025). Hambatan yang paling konsisten adalah kekurangan sumber daya manusia, rendahnya komitmen antar sektor, dan lemahnya partisipasi kader Bina Keluarga Remaja (BKR) (Dewi et al., 2022; Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025).

Untuk penelitian di Kecamatan Kawali, literatur ini menunjukkan bahwa implementasi Bina Keluarga Remaja (BKR) perlu dibaca sebagai proses yang bergantung pada peran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kapasitas kader, dukungan pemerintah desa, dan koordinasi antaraktor lokal. Peran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) muncul konsisten sebagai ujung tombak pelaksanaan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di tingkat desa dan kelurahan karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dalam sosialisasi dan penyuluhan (Latifah, 2025).

Literatur juga menegaskan bahwa Bina Keluarga Remaja (BKR) akan lebih efektif bila didukung oleh penguatan kompetensi kader, modul atau media pembelajaran yang sesuai, dan keterlibatan orang tua secara aktif (Dewi et al., 2022; Kosim et al., 2024). Pengembangan modul parenting berbasis nilai yang dinilai sangat valid dan praktis menunjukkan bahwa kualitas materi serta kesiapan kader merupakan unsur penting dalam keberhasilan implementasi Bina Keluarga Remaja (BKR) (Kosim et al., 2024).

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa Program Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan instrumen strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memperkuat kualitas remaja melalui keluarga, tetapi keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh

konsistensi pembinaan, kecukupan sumber daya, kualitas kader, komunikasi lintas sektor, dan dukungan lingkungan lokal. Karena itu, penelitian tentang implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, dapat diletakkan pada asumsi bahwa capaian program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi terutama oleh kemampuan aktor lokal menerjemahkan Bina Keluarga Remaja (BKR) ke dalam praktik pembinaan keluarga yang berkelanjutan dan sesuai konteks setempat.

2.2.6 Implementasi Program BKR oleh Tim BKKBN

Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam penelitian tentang implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, paling tepat dipahami sebagai intervensi pembangunan keluarga yang menempatkan keluarga dengan remaja usia 10–24 tahun sebagai sasaran utama pembinaan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pengasuhan orang tua (Astuty et al., 2022; Dewi et al., 2022; Harjunia et al., 2025; Kosim et al., 2024). Dalam ekosistem Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Bina Keluarga Remaja (BKR) tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan program Bangsa Kencana, GenRe, PUP, PIK-R, dan pembangunan keluarga berbasis komunitas, sehingga implementasinya di tingkat kecamatan secara inheren menuntut koordinasi antarlembaga dan integrasi layanan (Efiyanti et al., 2022; Januar, 2011; Latifah, 2025; Wulandari, 2021).

Implementasi Bina Keluarga Remaja (BKR) umumnya dijalankan melalui penyuluhan, diskusi kelompok, pendampingan keluarga, pelatihan kader, dan pembinaan berkelanjutan, bukan hanya melalui sosialisasi satu arah (Akma et al., 2025; Astuty et al., 2022; Dewi et al., 2022; Munawar & Renggina, 2021). Literatur juga menunjukkan bahwa materi Bina Keluarga Remaja (BKR) mencakup pendewasaan usia perkawinan, komunikasi orang tua-remaja, kesehatan reproduksi, TRIAD KRR, gizi remaja, dan fungsi keluarga, sehingga keberhasilan implementasi bergantung pada kemampuan tim Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerjemahkan materi yang luas ini ke dalam praktik lokal yang dipahami sasaran (Astuty et al., 2022; Dewi et al., 2022; Ikhwan Saufa & Gusti Pirandy, 2023; Mumtingah et al., 2024).

Efektivitas program appears positif ketika pembinaan berjalan rutin dan didukung struktur pelaksana yang aktif. Studi kuantitatif di Palangga Selatan menemukan Bina Keluarga Remaja (BKR) berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan, sikap, dan tindakan remaja dalam pencegahan stunting, dengan $p\text{-value} < 0,001$ pada ketiga variabel (Harjunia et al., 2025). Kegiatan pembinaan di Sukaraja juga meningkatkan skor rata-rata pengetahuan dan sikap remaja tentang pendewasaan usia perkawinan, dan kegiatan berjalan dengan dukungan peserta penuh serta tindak lanjut monitoring yang dianjurkan (Dewi et al., 2022).

Kegiatan pembinaan di Sukaraja juga meningkatkan skor rata-rata pengetahuan dan sikap remaja tentang pendewasaan usia perkawinan, dan kegiatan berjalan dengan dukungan peserta penuh serta tindak lanjut monitoring yang

dianjurkan (Arifianingsih, 2025; Suardi Mukhlis et al., 2025; Zhafirah et al., 2026). Sebaliknya, implementasi menjadi tidak optimal ketika program berhenti pada tahap sosialisasi, kelompok tidak aktif, materi tidak sesuai kebutuhan, atau partisipasi keluarga rendah (Dewi et al., 2022; Ni Putu Glory Damayanti et al., 2025).

Aspek lain yang semakin penting adalah dukungan materi dan data. Pengembangan modul parenting untuk Bina Keluarga Remaja (BKR) dinilai sangat valid dan praktis untuk memperkuat kemampuan kader dan orang tua (Kosim et al., 2024). Pada saat yang sama, digitalisasi data melalui SIGA meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelaporan, meski masih dibatasi infrastruktur dan jaringan internet (Dinda & Choiriyah, 2025).

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menempatkan implementasi program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, sebagai proses kelembagaan dan sosial yang keberhasilannya ditentukan oleh kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM), kekuatan koordinasi lintas sektor, kualitas pembinaan kader dan orang tua, partisipasi keluarga sasaran, serta kemampuan menyesuaikan program dengan konteks lokal. Fokus penelitian yang paling relevan untuk judul tersebut adalah menilai apakah tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kawali telah menjalankan Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai pembinaan keluarga yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan sosialisasi administratif.

2.3 Kerangka Pemikiran

Administrasi publik merupakan bidang keilmuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan publik melalui proses pengelolaan kebijakan, organisasi, sumber daya, dan pelayanan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam konteks tersebut, implementasi program menjadi bagian penting karena merupakan tahap ketika kebijakan atau program diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh organisasi pelaksana. Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam mengelola sumber daya, membangun koordinasi, menjalankan kegiatan, serta menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi lingkungan masyarakat.

Salah satu program pemerintah dalam pembangunan keluarga adalah Program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam membina dan mendampingi remaja. Pelaksanaan Bina Keluarga Remaja (BKR) melibatkan berbagai aktor, antara lain tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), penyuluh atau petugas lapangan, kader, pemerintah daerah, serta keluarga sebagai sasaran program. Dengan banyaknya aktor dan aspek yang terlibat, implementasi Bina Keluarga Remaja (BKR) tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, tetapi juga mencakup penyediaan sumber daya, pembagian tugas, komunikasi dan koordinasi, komitmen pelaksana, serta dukungan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pelaksanaan Bina Keluarga Remaja (BKR) masih menghadapi berbagai persoalan, seperti rendahnya partisipasi sasaran, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, sosialisasi yang belum optimal, koordinasi yang belum konsisten, serta keterbatasan kemampuan kader. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Bina Keluarga Remaja (BKR) tidak cukup dipahami hanya dengan melihat tercapai atau tidaknya tujuan program, tetapi perlu dianalisis melalui proses implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis sebagai fokus kajian dalam perspektif Administrasi Publik.

Untuk menganalisis implementasi tersebut, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai *tools of analysis*. Pemilihan model ini didasarkan pada kemampuannya menjelaskan implementasi melalui berbagai unsur yang saling berkaitan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan enam variabel yang memengaruhi implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; karakteristik badan pelaksana; komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan; disposisi pelaksana; serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keenam variabel tersebut digunakan sebagai alat untuk memahami proses implementasi Bina Keluarga Remaja (BKR) secara lebih sistematis pada tingkat Kecamatan.

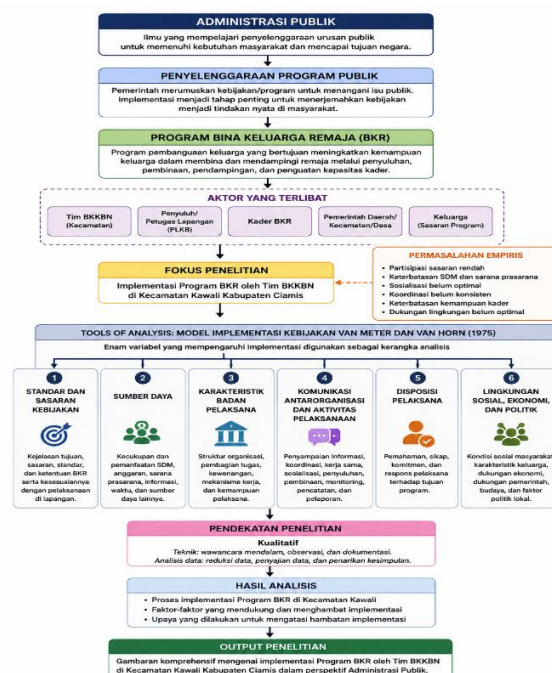
Standar dan sasaran kebijakan digunakan untuk melihat kejelasan tujuan, sasaran, serta standar pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dan

kesesuaiannya dengan pelaksanaan di lapangan. Sumber daya digunakan untuk mengkaji ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, informasi, dan sumber daya lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Karakteristik badan pelaksana digunakan untuk melihat struktur organisasi, pembagian tugas, kewenangan, dan kemampuan tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta aktor pelaksana lainnya. Selanjutnya, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan digunakan untuk menganalisis penyampaian informasi, sosialisasi, koordinasi, kerja sama, serta aktivitas pelaksanaan Bina Keluarga Remaja (BKR). Disposisi pelaksana digunakan untuk melihat pemahaman, sikap, komitmen, dan respons pelaksana terhadap program, sedangkan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik digunakan untuk memahami kondisi eksternal yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Kawali.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Keenam variabel Van Meter dan Van Horn tidak digunakan untuk menguji hubungan secara statistik, tetapi sebagai kerangka analisis dalam menggali informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dilaksanakan oleh tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan Administrasi Publik sebagai landasan keilmuan, Program Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai program publik yang diteliti, dan model Van Meter dan Van Horn sebagai *tools of analysis*. Keenam variabel dalam model tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis sehingga diperoleh gambaran mengenai proses pelaksanaan program, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi. Dengan kerangka tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) pada tingkat kecamatan dalam perspektif Administrasi Publik.

Diagram 2.3.1



2.4 **Proposisi**

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian mengenai Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh Tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, selanjutnya disusun proposisi utama penelitian sebagai berikut:

Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) oleh tim BKKBN di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ditentukan oleh keterpaduan standar dan sasaran program, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sebagaimana dikemukakan dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975).